



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- ~~349~~ -2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, agar lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



7. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun
13. 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

A

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kota Sawahlunto Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus bertanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA :** Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- KEEMPAT :** Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu :
- meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;



- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KELIMA

: Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang;
- c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang, dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;



- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

KETUJUH

: Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan Tambahan Uang dari Bendahara Umum Daerah;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KEDELAPAN

: Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUH Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;



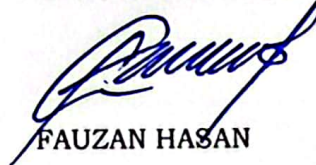
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
2. Kepala Cabang Bank Nagari (BPD) Sumbar Cabang Sawahlunto; dan
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3. **349** -2004
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	Bendahara Penerimaan	WIRDA ARIANI NIP. 19840120 201407 2 002 NPWP. 15.317.959.3.203.000 Pengatur Tk. I (II/d) Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	AYUSMA DEWI, A. Md NIP. 19850101 201001 2 042 NPWP. 16.610.212.9-203.000 Rekening . 1100.0101.00304.5 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal di lingkungan Asisten Administrasi Umum
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	LISNENI AYENI, S. Ap NIP. 19780302 200701 2 003 NPWP. 69.106.915.7-203.000 Penata (III/c) Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	EKA PRAMANA, S. Pd NIP. 19861109 201001 2 004 NPWP. 87.731.359.3-312.000 Penata Tk. I (III/d) Analisis Data dan Informasi	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran, permintaan pembayaran seluruh Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	SEKRETARIAT DPRD	Bendahara Pengeluaran	MEGA YUSPITA, SAP NIP. 19860601 201407 2 004 NPWP. 71.918.536.5-203.000 Rekening . 1100.0101.00302.9 Penata Muda (III/a) Staf Bagian Umum	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
3	INSPEKTORAT KOTA	Bendahara Pengeluaran	LENI MARLIYOSRI NIP. 19820311 200901 2 006 NPWP. 78.288.868.7-203.000 Rekening . 1100.0101.00307.3 Penata Muda (III/a) Staf Inspektorat Kota	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
4	DINAS PENDIDIKAN	Bendahara Pengeluaran	DESI WARTIN NOVITA, S. Sos NIP. 19800818 200701 2 004 NPWP. 69.106.764.9-203.000 Rekening . 1101.0210.00738.3 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Dinas Pendidikan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	YESI ACHZI, S. Pd NIP. 19790112 201407 2 003 NPWP. 88.049.943.9-203.000 Rekening . 1100.0210.07681.1 Penata Muda Tk. I (III/b) Bendahara Pengeluaran Pembantu	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

8

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5	DINAS KEBUDAYAAN	Bendahara Penerimaan	MUHAMMAD NUR FAHMI, A.Md NIP. 19931110 201902 1 004 NPWP. 90.939.185 6-112.000 Pengatur Tk. I (II/d) Staf Dinas Kebudayaan	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	ELVA RIANTIKA NIP. 19830420 200801 2 003 NPWP. 77.038.773 6-203.000 Rekening . 1100.0101.00433.2 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Kebudayaan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Bendahara Penerimaan	AMRIZAL NIP. 19730205 200701 1 008 NPWP. 46.084.334.5-203.000 Pengatur (II/c) Staf Subag Keuangan dan Pelaporan	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	DODI ASRA KUDUS, A.Md NIP. 19760812 200901 1 005 NPWP. 75.152.368.9-203.000 Rekening . 1100.0101.00322.3 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Subag Keuangan dan Pelaporan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
7	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Bendahara Pengeluaran	SANDRA POPI RAMA, S.AP NIP. 19770110 200604 1 009 NPWP. 71.948.828.0-203.000 Rekening . 1100.0210.00090-7 Penata Muda (III/a) Staf Sub. Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
	BENDAHARA UPTD INSTALASI FARMASI KOTA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan	FRISKA PRIMA DEWI, Amd. Keb NIP. 19930829 201503 2 001 NPWP. 88.047.740.1-203.000 Rekening . 1100.0210.07820.9 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal pada Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan
	BENDAHARA UPTD INSTALASI FARMASI KOTA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Instalasi Farmasi Kota	YUS INDAH SARAGIH, AMF NIP. 19880215 201001 2 010 NPWP. 15.211.137.3-201.000 Rekening . 1100.0210.04564.2 Penata Muda (III/a) Staf UPTD Instalasi Farmasi Kota	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal pada Instalasi Farmasi Kota
	BENDAHARA UPTD PUSKESMAS TALAWI	Bendahara Penerimaan Pembantu	VIOJA HUMAIDA, A.Md.KG NIP. 19970906 202012 2 000 NPWP. 964742233202000 Pengatur Tk. I (II/d) Terapis gigi dan mulut terampil	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Blud Puskesmas Talawi
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK	YENI FEBRIANTIKA, A.Md.Kep NIP. 19930202 202012 2 017 NPWP. 73.227.082.203.2.000 Rekening . 1102.0210.08337-4 Pengatur Tk. I (II/d) Perawat Pelaksana	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BOK
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	NAILATUL FAUZIAH, A.Md.Kep NIP. 19930202 202012 2 007 NPWP. 90.890.707.4.202.000 Rekening . 1100.0210.12146-0 Pengatur Tk. I (II/d) Perawat Pelaksana	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BLUD

8

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	BENDAHARA UPTD PUSKESMAS KOLOK	Bendahara Penerimaan Pembantu	RIZKI MUTIARA, A Md, RM NIP. 19860214 200902 2 008 NPWP : 88.049.994.2.203.000 Penata Tk. I (III d) Rekam Medis Penyelia	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Blud Puskesmas Kolok
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK	DISA ZALMARTA NIP. 19910327 202012 2 014 NPWP : 01.227.360.3.203.000 Rekening . 1009.0210.08156-7 Pengatur Tk. I (II/d) Perawat Trampil	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BOK
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	DARA ALVIOLIN NIP. 19950707 202012 2 022 NPWP : 41.038.275.8.203.000 Rekening . 1100.0210.18836-5 Pengatur Tk. I (II/d) Perawat Trampil	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BLUD
	BENDAHARA UPTD PUSKESMAS SEI DURIAN	Bendahara Penerimaan Pembantu	YUNITA HONESTY, SKM NIP. 19910621 201902 2 000 NPWP : 90.884.776.7-202.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Blud Puskesmas Sei Durian
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK	LINDUNG WULANTARI ISMA, S.Farm.Apt NIP. 19900314 201902 2 005 NPWP : 55.095.574.7.203.004 Rekening . 1100.0210.12148-2 Penata (III/c) Apoteker Ahli Muda	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BOK
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	SUCI MELIA JUITA RAHMI, A.md,Kep. NIP. 19930607 201902 2 006 NPWP : 55.092.574.7.203.009 Rekening . 1101.0210.03351-3 Pengatur Tk. I (II/d) Perawat Terampil	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BLUD
	BENDAHARA UPTD PUSKESMAS LUNTO	Bendahara Penerimaan Pembantu	MERISA AMRIANI, SKM NIP. 19941205 201902 2 005 NPWP : 80.601.871.9-201.000 Penata Muda Tk. I (III.b) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Blud Puskesmas Lunto
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK	MEIRINA HASTRI, A.Md, Keb. NIP. 19930510 20192 2 004 NPWP : 75.183.845.9-202.000 Rekening . 1101.0210.03350-2 Pengatur Tk. I (II/d) Bidan Trampil	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BOK
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	DEVI OKTARIA, A.Md,Kep NIP. 19871006 201902 2 004 NPWP : 90.863.605.3.203.000 Rekening . 1100.0210.12156-3 Pengatur Tk. I / II.d Bidan Trampil	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BLUD
	BENDAHARA UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG	Bendahara Penerimaan Pembantu	WIDYA HELFIANTI, A.md.PK NIP. 19870727 200902 2 005 NPWP : 59.285.107.5.203.000 Penata / III/c Perekam Medis Penyelia	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Blud Puskesmas Kampung Teleng
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK	YULIA HANDAYANI, A.Md,Kep NIP. 19890813 201503 2 004 NPWP : 73.163.490.3.203.000 Rekening . 1101.0210.02075-2 Penata Muda (III/a) Bidan Mahir	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BOK

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	BENDAHARA UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	Na. ARLISMA NELI, S. Keb NIP. 19870411 201001 2 018 NPWP : 90.853.916.6-203.000 Rekening . 1100.0210.20402.3 Penata (III/c) Perawat Ahli Muda	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BLUD
		Bendahara Penerimaan Pembantu	FEBRI YETTI, Am.Ak NIP. 19870224 201001 2 024 NPWP. 88.047.631.2-203.000 Penata / III.c Pranata Laboratorium Penyelia	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Blud Puskesmas Silungkang
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK	RAHMA PURNAMA SARI, Amd,Keb NIP. 19881123 201902 2 003 NPWP. 78.098.560.2-202.000 Rekening . 1101.0210.03355.0 Pengatur Tk. I (II/d) Bidan Terampil	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BOK
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	SHANDRA KHRISTY,S.Gz NIP. 19860322 200902 2 010 NPWP. 15.412.603.1-203.000 Rekening . 1100.0210.04612.9 Penata Tk. I (III/d) Nutrisi Ahli Muda	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran/permintaan pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU) dan LS pada Program/Kegiatan BLUD
	UOBK RSUD	Bendahara Penerimaan Pembantu	ALVA EDISON, SE NIP. 19821030 200604 1 002 NPWP : 14.611.425.1-203.000 Penata (III/c) Staf Keuangan RSUD	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas BLUD RSUD
		Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD	SRI MULYATI NIP. 19780110 200701 2 004 NPWP : 69.106.790.4.203.000 Rekening . 1100.0101.00318.7 Penata Muda (III/a) Staf Keuangan RSUD	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal program dan Kegiatan pada RSUD
		Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	WINDRAWATI, S.Akt NIP. 19711026 200604 2 007 NPWP : 77.643.677.6.203.000 Rekening . 1100.0101.00066.3 Penata (III/c) Staf Keuangan RSUD	2 Januari 2025	Menandatangani bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal program dan Kegiatan pada RSUD yang berasal dari dana BLUD
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Bendahara Pengeluaran	NOVA SUFIRA NIP. 19840919 201407 2 003 NPWP : 71.895.652.7.203.000 Rekening . 1100.0101.00351.1 Penata Muda (III/a) Staf Subag Administrasi Keuangan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Bendahara Penerimaan	ISNORA SAMAN NIP. 19810531 200701 2 002 NPWP. 69.106.945.4.203.000 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	YULI FERAWATI, A.Md NIP. 19910705 202203 2 002 NPWP. 85.673.968.203.000 Rekening . 1100.0101.00315.9 Pengatur (II/c) Staf Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal

8

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bendahara Penerimaan	FRIDONI EKA PUTRA NIP. 19780721 200701 1 005 NPWP. 15.318.907.1.203.000 Pengatur Muda (III/a) Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	SARWI PRIHATIN, S.A.P NIP. 19750717 200604 2 014 NPWP. 88.047.778.1-203.000 Rekening . 1100.0101.00321.1 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya	ROBERT GUSWARA NIP. 19800501 201503 1 003 NPWP. 73.121.904.4-203.000 Pengatur (II/c) Staf Bidang Tata Ruang	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal bidang Cipta Karya
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga	HENDRA NIP. 19820816 2015603 1 003 NPWP. 73.060.377.6-203.000 Pengatur (II/c) Staf Subag Keuangan, Program dan Pelaporan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal bidang Bina Marga
11	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Bendahara Penerimaan	ZAMBRI YANTO NIP. 19941005 201503 1 001 NPWP : 73.135.099.7-203.000 Pengatur (II/c) Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	HIDAYATI, S.A.P NIP. 19810404 200701 2 005 NPWP. 69.106.922.3.203.000 Rekening . 1100.0101.00348.1 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Bendahara Pengeluaran	SUSI YULIANTI NIP. 19820908 200901 2 006 NPWP. 14.935.027.4.203.000 Rekening . 1100.0101.00431.9 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Bendahara Penerimaan	HERMAN NIP. 19720504 200604 1 010 NPWP : 69.106.765.6-203.000 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	RUSLINA YULISA NIP. 19850730 201001 2 031 NPWP : 78.109.228.3.204.000 Rekening . 1100.0101.00316.2 Pengatur Tk. I (II/d) Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal

7

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Bendahara Penerimaan	SUHEFI, S.A.P NIP. 19751011 200701 1 003 NPWP : 69.106.848.4.203.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	YUSFRIANTI NIP. 19731110 200701 2 009 NPWP : 69.106.670.8.203.000 Rekening . 1100.0101.00320.8 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
15	DINAS PERHUBUNGAN	Bendahara Penerimaan	RINA ANGGRAINI NIP. 19800616 200003 2 001 NPWP : 48.900.531.4.203.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Dinas Perhubungan	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	GUSTRI RATNASARI, SE NIP. 19850820 201001 2 028 NPWP. 46.123.470.0-203.000 Rekening . 1100.0101.00349.2 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Dinas Perhubungan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Bendahara Pengeluaran	WIRDAWATI, A.Md NIP. 19861004 201001 2 027 NPWP. 15.318.820.6-203.000 Rekening . 1100.0101.00432.1 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Bendahara Pengeluaran	VITRATUL RAHMAYENI, A.Md NIP. 19860323 201001 2 026 NPWP. 67.170.671.1.201.000 Rekening . 1100.0101.00350.9 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Bendahara Penerimaan	GITA DARMIYANTI, A.Md NIP. 19910521 201902 2 008 NPWP. 71.753.246.9.203.000 Penata Muda (III/a) Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Januari 2025	Menandatangani Bukti Penerimaan dan Melakukan Penyetoran ke Kas Daerah
		Bendahara Pengeluaran	FAJRIYANI NIP. 19821010 200501 2 011 NPWP. 48.900.640.3-203.000 Rekening . 1100.0101.00403.4 Penata Muda (III/a) Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran atas belanja operasi, belanja modal, belanja bunga, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	IMELDA SAVITRI, A.Md NIP. 19751705 200604 2 014 NPWP. 88.831.920.9-203.000 Rekening . 1100.0101.00370.4 Penata Tk. I (III/b) Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Januari 2025	Menandatangani SPP LS dan bukti pembayaran atas belanja transfer

1

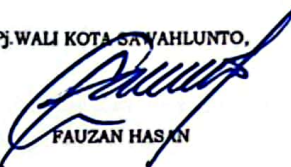
NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bendahara Pengeluaran	SRI WAHYUNI NIP. 19841212 200901 2 003 NPWP. 14.935.107.4.203.000 Rekening . 1100.0210.01113.9 Pengatur Muda Tk. I (II/d) Staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Bendahara Pengeluaran	INDRI ASTUTI, S.Akun NIP. 19860503 201503 2 002 NPWP : 73.221.726.0.203.000 Rekening . 1100.0101.00308.5 Penata Muda (III/a) Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Bendahara Pengeluaran	RESROWINTA, S. AP NIP. 19840431 201407 2 006 NPWP. 75.210.397.8-203.000 Rekening : 1100.0101.00310-6 Pengatur Muda (III/a) Staf Badan Kesatuan Bangsa dan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bendahara Pengeluaran	ASWENTI NIP. 19780929 200701 2 004 NPWP. 61.942.876.6-203.000 Rekening . 1100.0101.00545-6 Penata Muda (III/a) Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bendahara Pengeluaran	ZULFA MORINA, S.A.P NIP. 19830909 201001 2 033 NPWP. 68.052.456.8.215.000 Rekening . 1100.0101.00548.2 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
24	KECAMATAN BARANGIN	Bendahara Pengeluaran	WONG IN CE NIP. 19870427 201503 1 004 NPWP. 77.038.758.7-203.000 Rekening . 1100.0101.00313.4 Pengatur (II/c) Staf Subag Administrasi Keuangan Kecamatan Barangin	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Durian I	ARNITA, S.AP NIP. 19740515 200801 2 001 NPWP. 69.106.812.6-203.000 Rekening . 1100.0101.00556.3 Penata Muda Tk. I (III/b) Kasi Pelayanan Umum	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Durian I
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Durian II	YUSNELI, S.AP NIP. 19730812 200604 2 017 NPWP. 48.900.486.1-203.000 Rekening . 1100.0101.00557.4 Penata (III/c) Kasi Perekonomian dan Pembangunan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Durian II

8

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Lubang Panjang	MUHAMMAD NAJIB, SE NIP. 19830404 201001 1 022 NPWP. 15.740.026.8-203.000 Rekening . 1100.0101.00547.1 Penata Tk. I (III/d) Kasi Perekonomian dan Pembangunan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Lubang Panjang
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Saringan	FERIANDI, SH NIP. 19770303 200701 1 008 NPWP. 69.478.189.9-203.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Saringan
25	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	Bendahara Pengeluaran	IKA HARMI NIP. 19900925 201001 2 002 NPWP. 15.585.309.6-203.000 Rekening . 1100.0101.00312.1 Pengatur (II/d) Staf Kecamatan Lembah Segar	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Air Dingin	YURNALIS NIP. 19720820 199403 2 002 NPWP. 69.688.720.7-203.000 Penata (III/c) Kasi Pelayanan Umum	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Air Dingin
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Kubang Sirakuk Utara	JULAUDI, S.Sos NIP. 19821217 200901 1 003 NPWP. 16.057.608.8-203.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Aur Mulyo	DERI METRA, S.Sos NIP. 19811225 200901 1 002 NPWP. 72.302.208.3-203.000 Penata (III/c) Kasi Perekonomian dan Pembangunan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Aur Mulyo
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Pasar	NILAWATI, A.Md NIP. 19730830 200604 2 004 NPWP. 48.900.589.2-201.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Kasi Pelayanan Umum	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Pasar
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan	YULIUS PONIMIN NIP. 19670928 199003 2 006 NPWP. 49.900.464.8-203.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Kasi Perekonomian dan Pembangunan	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan
		Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Tanah Lapang	NOVIARTI NIP. 19751120 199703 2 002 NPWP. 47.550.374.4-201.000 Penata Muda Tk. I (III/b) Kasi Pelayanan Umum	2 Januari 2025	Menandatangani SPP TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal Kelurahan Tanah Lapang
26	KECAMATAN SILUNGKANG	Bendahara Pengeluaran	NADIYA PARADES WARI, S.Sos,MM NIP. 19911217 201001 2 001 NPWP. 88.047.617.1.203.000 Rekening . 1100.0101.00311.9 Penata Muda Tk I (III/b) Penyusun Bahan Informasi dan Publik	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal

NO.	OPD	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NAMA/NIP/NPWP PANGKAT (GOL/RUANGAN) JABATAN	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
27	KECAMATAN TALAWI	Bendahara Pengeluaran	KHAIRUL ANWAR, S.AP NIP. 19770821 200701 1 006 NPWP : 00.120.528.5.203.000 Rekening . 1100.0101.00314.7 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Kecamatan Talawi	2 Januari 2025	Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS dan bukti pembayaran belanja operasi dan belanja modal

Pj.WALI KOTA SAWAHLUNTO.


FAUZAN HASAN



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **330** /WAKO-SWL/2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH SERTA PEJABAT PENANDA TANGAN
SURAT PENYEDIAAN DANA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Lampiran Bab I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penanda Tangan Surat Penyediaan Dana ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah serta Pejabat Penanda Tangan Surat Penyediaan Dana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah serta Pejabat Penanda Tangan Surat Penyediaan Dana dengan nama, jabatan, *specimen* tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

7

- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- k. mengelola investasi;
 - l. menetapkan anggaran kas;
 - m. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - n. membuka rekening Kas umum daerah;
 - o. membuka rekening penerimaan;
 - p. membuka rekening pengeluaran; dan
 - q. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. melakukan penagihan piutang daerah;

- l. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
- m. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
- n. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus bertanggung jawab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

30 DEC 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto; dan
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto.

7

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/~~330~~/WAKO-SWL/2022
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH SERTA PEJABAT
PENANDA TANGAN SURAT PENYEDIAAN DANA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	SPECIMEN TANDA TANGAN	SPECIMEN PARAF	TMT
1	2	3	4	5	6
1.	AFRIDARMAN, SE NIP. 19730710 200312 1 004	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)			2 JANUARI 2023
2.	RIHARTANTI, SE NIP. 19730713 200604 2 006	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD)			2 JANUARI 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

30 DEC 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

4a

Handwritten signature

1st

KEPALA BAGIAN HUKUM
Jalan Satek Kuningan 10001
Telp. 021-7500011

INDRA MULYONO, S.H.
NIK. 196005120001201001